

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang – Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenaaap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Menyatakan bahwa :

“Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1

oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HAKI. Hukum HAKI ini meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak – hak yuridis dari karya – karya atau ciptaan – ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.<sup>2</sup>

Di dalam bidang hak cipta , yang merupakan bagian dari HAKI terkandung hak – hak eksploitasi atau hak – hak ekonomi , dan hak – hak moral. Berdasarkan hak – hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seseorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan – keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai.<sup>3</sup>

Untuk Keperluan ini, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang – undangan mengenai hak cipta yaitu Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, selanjutnya Penulis menyebut UU Hak

---

<sup>2</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, , Alumni, Bandung, 2018, Hlm.8

<sup>3</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm.4

Cipta . Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Jadi Hak Cipta dimaksudkan sebagai hak khusus bagi pencipta untuk memproduksi karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Kemudian dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;

---

<sup>4</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cv.Mandar Maju, Bandung, cet.1, 2012, hlm.36

- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan
- r. Program Komputer.

Merujuk pada Pasal di atas disebutkan bahwa salah satu ciptaan yang dilindungi adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Dalam era digital sekarang ini banyak sekali media yang memfasilitasi untuk seseorang menampilkan karyanya, sehingga cepat viral dan mendapat keuntungan, dalam hal ini mendapatkan uang dari karya tersebut, salah satunya di media YouTube. Namun banyak pengguna YouTube atau dapat di sebut seorang Youtuber, menjiplak/meniru karya orang lain sehingga dirinya mendapat keuntungan dari karya orang lain tersebut, salah satunya dengan mengcover lagu/ menaransemen ulang lagu yang dinyanyikan oleh seorang Youtuber tanpa meminta izin dari penciptanya.

Seperti halnya pada kasus Band lokal ternama di Indonesia Yaitu Payung Teduh yang keberatan lagu mereka yang berjudul “Akad’ di nyanyikan ulang atau di cover tanpa izin oleh Youtuber ataupun cover artis, kasus lainnya yaitu seorang penyanyi dangdut bernama Maulidia Octavia atau sering di sebut Via Vallen yang mendapatkan teguran keras dari Band lokal ternama Superman Is Dead (SID) gara – gara mengcover lagu mereka yang berjudul “Sunset Di Tanah Anarki” tanpa meminta izin kepada

pencipta lagu tersebut, dan di katakan Via Vallen tidak faham akan arti yang mendalam tentang Lagu Sunset Di Tanah Anarki sehingga terlihat merendahkan makna dari lagu tersebut.<sup>5</sup> Lalu dilanjut dengan Kasus Band Anima, yang mana salah satu personel Band tersebut yang merupakan sang vokalis dan pencipta lagu di Band Anima yaitu Isa Dan Jeje dikeluarkan secara tidak hormat, namun sampai sekarang Band Anima masih terus menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Isa dan Jeje tanpa meminta Izin kepada mereka berdua, Sehingga Isa dan Jeje menuntut Hak ekonomi mereka kepada Band Anima karena menyanyikan lagu tanpa smendapat Izin dari Isa dan Jeje.<sup>6</sup> Yang menjadi permasalahan disini adalah ketenaran, dan keuntungannya melabihi sang pencipta lagu, sehingga seorang youtuber mendapat keuntungan besar dari hasil karya ciptaan orang lain, serta ketidak tahuannya seorang peng cover lagu akan makna sebuah lagu yang mereka cover.

Uraian di atas menjelaskan bahwa lagu-lagu cover yang diciptakan untuk tujuan komersial tentunya dengan hanya mencantumkan nama penyanyi aslinya saja pada karya cover tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang hak cipta. Selain pencantuman nama pencipta lagu, diperlukan juga izin dari pencipta lagu tersebut jika ingin mengcover

---

<sup>5</sup> Payung Teduh Dibully Gara-gara Keberatan Cover Lagu Akad, Melalui: <http://m.tribunnews.com/seleb/2017/10/12/payung-teduh-dibully-gara-gara-keberatan-cover-lagu-akad> >Diakses pada Minggu 28 Juli 2019 Pukul 19.10 WIB.

<sup>6</sup> Hasil wawancara pribadi penulis dengan Bapak Fahmi Mifta Pratama, S.H.,Adv. Selaku Pengacara Isa dan Jeje, tanggal 1 September 2019, Jam 16.00 Wib.

lagu yang kemudian akan di publikasikan di media sosial. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang mana dipasal tersebut menyatakan :

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.”

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada, hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah di kopi.<sup>7</sup> Pelanggaran hak cipta adalah salah satu perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*). Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*) adalah salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun tidak dikehendaki atau disengaja, pelaku harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>8</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

---

<sup>7</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cv.Mandar Maju, Bandung, cet.1, 2012, hlm.42

<sup>8</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV. Pustaka Setia,Bandung, 2015, hlm. 77.

Rumusan pengertian dan pelaksanaan “perbuatan melawan hukum” sebelum dan sesudah tahun 1919 (*Arrest Hoge Raad Belanda*) tanggal 19 Desember 1919, adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- 1) Sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum itu terjadi, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis (UU) hanya dalam hal :
  - a. Melanggar hak orang lain yang diakui UU, atau melanggar ketentuan tertulis saja, misalnya, mengambil barang (hak) orang lain tanpa seizin yang berhak (pemilik), merusak barang milik orang lain, dan sebagainya;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, misalnya, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban, atau tidak memberi hak mendahului bagi orang lain di persimpangan jalan, dan sebagainya.
  - a. Sesudah tahun 1919, yaitu setelah keluarnya *Arrest* (putusan) Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda pada tanggal 31 Desember 1919, memutuskan bahwa suatu perbuatan digolongkan melawan hukum apabila:
    - 1) Setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

---

<sup>9</sup> Marwan Mas, *Pengantar ilmu hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, cet.2, Ed.3, 2015, hlm.35-

- a. Melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap keseksamaan yang layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda orang lain.

Selain Perbuatan melawan hukum, pelanggaran hak cipta di bidang karya cipta lagu yang di nyanyikan ulang di media sosial tanpa meminta izin pencipta juga merupakan bentuk penyalahgunaan tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, yang mana hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk, memberikan rasa nyaman,keadilan,dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi.”

Pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual di indonesia dari tahun 2011-2018 khususnya dibidang Hak Cipta ada sekitar 327 kasus.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dan memahami lebih dalam terkait pelanggaran perizinan cover lagu dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu, dengan judul “ **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang (Cover) Oleh Youtuber untuk**

---

<sup>10</sup> Data pelanggaran Kekayaan Intelektual Melalui :< <https://jabar.kemenkumham.go.id> >diakses pada 4 september 2019 , Jam 19.00 WIB.



**kepentingan komersial Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.28  
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang oleh Youtuber ?
2. Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang oleh Youtuber untuk kepentingan Komersial?
3. Bagaimana upaya penyelesaian masalah menyanyikan ulang karya cipta lagu oleh Youtuber untuk kepentingan komersial ?

**C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang oleh youtuber.
2. Utuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani pelaksanaan perlindungan hokum terhadap karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang oleh Youtuber untuk kepentingan Komersial

3. Untuk mengetahui upaya upaya penyelesaian masalah menyanyikan ulang karya cipta lagu oleh Youtuber untuk kepentingan komersial.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka diharapkan dapat diperoleh kegunaanya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengkajian konseptual di bidang ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan tentang perbuatan melawan hukum khususnya tentang hukum hak cipta.
  - b. Sebagai bahan referensi masukan kuliah dalam hal pendalaman ilmu hukum hak cipta khususnya dalam bidang karya cipta lagu di dalam menyanyikan ulang lagu (cover) di media sosial.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan dapat membantu masyarakat khususnya direktur jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengenai peraturan yang berkaitan dengan mengcover lagu di dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
  - b. Diharapkan dapat menjadi masukan untuk penyusunan produk hukum kaitanya dalam perlindungan hak cipta khususnya di bidang lagu.

## E. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai individu (Perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah.<sup>11</sup>

Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan-hubungan antara satu sama lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sehingga memerlukan suatu aturan yang menjadi aturan main dalam menjalani aktivitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.7, 2018, Hlm.29

<sup>12</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya, 2009. Hlm. 1

Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik rakyatnya dalam konstitusi Negara, yaitu Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D yang berbunyi :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap warga negaranya, terutama atas hak individunya yang di atur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun”.

Atas dasar itulah maka Negara Indonesia sebagai Negara Hukum berkewajiban untuk melindungi setiap hak-hak warganya.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.<sup>13</sup> selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari Hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.121

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.121

Aristoteles Beranggapan bahwa, Hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusnya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelangar.<sup>15</sup>

Salah satu tokoh Faham Historis yaitu Marxist menyatakan bahwasanya Hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu<sup>16</sup>. Sedangkan menurut faham positivis yaitu Hans kelsen Hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi – sanksi.<sup>17</sup>

Salah satu hakikat dari hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan Negara. Karena itu, dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan Negara menjamin hak – hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban, dan jaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu system keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga muncul konsep ketertiban hukum.

---

<sup>15</sup> Marwan Mas, *Pengantar ilmu hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, cet.2, Ed.3, 2015, hlm. 19

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm.20

<sup>17</sup> *Loc.cit.*

Dapat dikatakan bahwa karakteristik dari suatu ketertiban hukum (*legal order*) antara lain :<sup>18</sup>

1. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi – sanksi tertentu.
2. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan kaidah hukum memaksa).
3. Berlaku prinsip persamaan perlakuan diantara sesama anggota masyarakat (*equality before the law*).
4. Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, karena hukum selalu dapat diketemukan atau ditafsirkan dari kaidah kaidah hukum yang ada.
5. Berlaku prinsip mediasi internal hukum. Dalam hal ini jika terdapat hukum yang berbeda atau saling bertentangan , maka hukum itu sendiri menyediakan berbagai model penyelesaiannya. Misalnya dengan menggunakan asas *lex specialist derogate lex generalis*.
6. Objek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum.
7. Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan – paksaan dalam bentuk sanksi – sanksi hukum. Ini pula yang membedakan antara ketertiban hukum dengan ketertiban social lainnya.

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Teori – teori besar dalam hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, cet. 1, Ed. 1, 2013, Hlm. 105

Aturan – aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam mebebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.<sup>19</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis – dogmatik yang didasarkan pada aliran positivism di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu hukum yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

hukum tidaklah sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. sifat umum dari aturan aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata mata untuk kepastian.

Penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Adanya kepastian hukum masyarakat akan selalu tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang – undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efesiensi.

Tujuan Hukum selanjutnya Yaitu adalah Keadilan, Menurut Plato bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki



elemen principal yang harus dipertahankan, yaitu : pemilahan kelas – kelas yang tegas, misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para pengembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. Identifikasi takdir Negara dengan takdir kelas penguasanya, dan kepatuhan pada persatuannya, aturan atauran yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasaan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.<sup>20</sup>

Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum kepastian hukum dan keadilan dalam bidang hukum hak cipta maka sesuai dengan Undang – Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, peraturan pelaksanaan Undang – Undang Hak Cipta dan peraturan perundang – undangan yang lain terkait hak cipta. Artinya perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan dalam bidang hak cipta adalah para pemegang hak cipta harus memperoleh kepastian perlindungan mengenai haknya dan adanya intruksi yang jelas bagi pemerintah.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dengan kata lain pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, atau

---

<sup>20</sup> W.Fridmann, *Teori Dan Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,1994, hlm.292

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Sementara itu pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut.

1. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta.
2. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak cipta seperti seperti halnya hak-hak lainnya yang dikenal dalam hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain hasil karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cv.Mandar Maju, Bandung, cet.1, 2012, hlm.36

<sup>22</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, , Ghlmia Indonesia, Bogor,2010, hlm. 51.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan Bahwa :

“setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.”

Maka jika seseorang menyanyikan ulang lagu /mengcover lagu, lalu kemudian disebar luaskan dimedia sosial tanpa meminta izin kepada pencipta, sehingga orang tersebut mendapat keuntungan dalam hal ekonomi, maka pencipta lagu berhak atas ganti rugi akibat hak ekonomi pencipta di langgar oleh orang yang mengcover lagu tanpa meminta izin kepada pencipta lagu tersebut.

#### **F. Langkah – Langkah Penelitian**

Menurut Peter R. Senn Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.<sup>23</sup> Dalam melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan maka perlu dipergunakan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (cover) oleh youtuber untuk kepentingan komersial di hubungkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam usaha memperoleh suatu

---

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV.Mandar Maju,Bandung,2008, hlm.3

data sebagai bahan pembahasan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Pada penelitian ini Penulis menggunakan gambaran bagaimana pelaksanaan terkait perizinan menyanyikan ulang (cover) lagu sesuai Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat (1). Oleh Karena itu penelitian ini dimasukkan kedalam penelitian yuridis normatif yang dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditrik oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Secara normatif karena Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait sebagai hukum positif yang ada merupakan sumber penelitian ini. Sedangkan secara kualitatif karena informasi-informasi melalui wawancara yang disampaikan oleh responden dan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan mengcover lagu tanpa meminta izin kepada pencipta lagu tersebut.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga

berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>24</sup> Pada penelitian ini penulis mencoba menganalisis tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Di Nyanyikan Ulang (Cover) Oleh Youtuber untuk kepentingan komersial Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian secara yuridis normatif menggunakan data berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti,yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa literature-literatur yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan dalam penelitian, yaitu buku-buku hukum HAKI, hukum hak cipta dan buku-buku lain untuk menunjang bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum tersier berupa informasi yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang di dapatkan antara lain majalah, jurnal,Koran,kamus hukum, internet,makalah dan lain-lain.

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, 2006,hlm.5

### 3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber data

##### 1) Data primer

Data Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas, yang antara lain terdiri:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Khususnya Pasal 28;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- d) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik;
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

##### 2) Data sekunder

Yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum primer, dan dapat membantu menganalisa dan memenuhi bahan hukum primer, data yang diperoleh secara tidak langsung atau sumber data yang diperoleh melalui tahap studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder berupa :

- a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian ;
- b) Hasil penelitian berupa laporan tertulis; serta
- c) Berbagai bahan hasil diskusi dan tulisan ilmiah yang ada kaitanya dengan penelitian.

### 3) Data tersier

Data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum dan sekunder, antara lain terdiri dari :

- a) Kamus hukum Kamus bahasa Indonesia dan kamus lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- b) artikel, surat kabar, majalah, dan;
- c) bahan yang didapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

### b. Jenis Data

Jenis data kualitatif dalam penelitian ini meliputi data empiris dan data sekunder, penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ronny Hanittijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1994, Jakarta, hlm.5

Jenis data yang diperoleh dari konsep Undang-Undang Hak Cipta ,Buku-buku, Hasil penelitian, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan materi bahan penulisan hukum ini merupakan bahan hukum sekunder.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Studi kepustakaan

Yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dan sengketa pajak, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada<sup>26</sup>.

Tahapan penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, pengumpulan data dalam penelitian diperoleh melalui analisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta dokumen-dokumen ilmiah.

##### b. Studi Lapangan terdiri dari :

###### 1) Observasi

---

<sup>26</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Remaja Rosdakarya ,Bandung, 2004, hlm. 11



Observasi atau survey lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat di amati dengan kepala<sup>27</sup>.

## 2) Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian<sup>28</sup>. Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dan responden yang terpilih yang berhubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam hal ini hak ekonomi pencipta lagu. Wawancara ini dilakukan dengan lembaga yang bersangkutan yaitu Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Barat.

### c. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,

---

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cv.Mahdar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 169

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cv.Mahdar Maju ,Bandung, 2008, Hlm. 167

sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif<sup>29</sup>.

#### 5. Analisis data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis di uji.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan yang sesuai dengan judul penelitian ini.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 240

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan-rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih fokus, sehingga penelitian lebih terarah, penelitian ini diadakan di:

- a. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat;
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum;
- c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat.